



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXXX mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX
2. Bahwa XXXXX
3. Bahwa XXXXXX
4. Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan Iwan Irawan pada tanggal 11 Juli 2009;
5. Bahwa XXXXX

Dengan calon suaminya: XXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX

6. Bahwa XXXXX

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



7. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sudah lama saling kenal dan saling mencintai, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dan khawatir akan menimbulkan aib juga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dari calon suaminya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga karena telah bekerja dan memiliki usaha Pertambangan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah XXXX
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan XXXXX c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya adalah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **XXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon minta dispensasi untuk dapat dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXX** karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon telah haid/menstruasi sejak umur 12 tahun dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, misalnya memasak mencuci dan sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah SD dapat menulis dan membaca;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan pernikahan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa setelah nikah nanti anak Pemohon berjanji akan mempertahankan rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan sudah bekerja sebagai buruh swasta;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak ada paksaan dari orangtua Pemohon serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum berumur 19 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya **XXXXXX**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengenal calon istrinya bernama **XXXXXX** dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah dan sudah melamarnya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus sekolah SD dapat menulis dan membaca;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada paksaan untuk menikah dari siapapun juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berjanji nanti setelah nikah akan menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh swasta dengan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- per bulan per bulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXX** hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak saya dan mau menikah dengan anak Pemohon bernama **XXXXXX** dan sudah melamarnya;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan, dan apabila tidak segera menikah saya dan Pemohon merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan anak saya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai buruh swasta dengan penghasilan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup untuk berumah tangga dengan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),- per bulan per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P. 4 dan diparaf;
5. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat XXXXX, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P. 10 dan diparaf;
11. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi XXXXX, diberi tanda P. 12 dan diparaf;
13. Surat XXXXX, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Surat XXXXX, diberi tanda P. 14 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXX pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, hanya saja umur anak Pemohon belum 19 tahun, akan tetapi mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dengan erat dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh swasta dan memiliki penghasilan sejumlah XXXXX

2. **XXXXX** pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa XXXXX
- Bahwa XXXXX
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, hanya saja umur anak Pemohon belum 19 tahun, akan tetapi mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dengan erat dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



anak Pemohon berstatus jejaka;

- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai buruh swasta dan memiliki penghasilan sejumlah XXXXX

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d dan P.8, maka terbukti bahwa Pemohon adalah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



ibu kandung dari **XXXXX** yang pendaftaran pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **XXXXX**, disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan Undang-Undang, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibaca oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon, Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. dan Pasal 176 HIR. jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai pernyataan Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. 1 s/d. P. 14 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode Penggugat 1 s/d P. 8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti **XXXXXX**, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR. jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P. 14 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 167 HIR., kekuatan pembuktian bukti P. 14 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **XXXXX** merupakan anak sah dari Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXX**
4. Bahwa **XXXXX**
5. Bahwa **XXXXX**
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 s/d P.8), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.14), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.14) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan / perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik ;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya seperti mempertimbangkan kondisi psikologi, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Tsani Rabi'ah Adawiyah binti Abdul Rojak, yang baru berumur 18 tahun, ternyata sudah menginjak dewasa, karena telah siap menjadi ibu rumah tangga serta telah mengalami menstruasi sejak tamat SD, dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan memasak, hal tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan Pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara phisik dan psichis telah siap untuk menikah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan sedarah maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon **XXXXX** dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan antara anak Pemohon dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya sudah sering berduaan, maka cukup alasan kekhawatiran Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena itu anak Pemohon nama **XXXXX**, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُؤًا.»

Artinya : Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX** sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXXXX**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **XXXXXX**

Demikianlah ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan **XXXXXX** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Maskur Ramdani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, SH.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 75.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| JUMLAH | : | Rp. 195.000,- |
|---------------|---|----------------------|

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tsm